

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN WISATA HUTAN MANGROVE
DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI



Nomor Stambuk : 105640194214

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN WISATA HUTAN MANGROVE
DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa

: Ardiansyah

Nomor Stambuk

: 105640194214

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing I

Bapak Setiawati
Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Pembimbing II

Bapak Burhanuddin
Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si.

Dekan Fisipol
Unismuh Makassar

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Bapak Ihyani Malik
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Bapak Nuryanti Mustari
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.



PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan penguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021.



1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Ahmad Harakan , S.I.P., M.HI
3. Hamrun, S.I.P., M.Si

(.....)
Budi Setiawati
(.....)
Ahmad Harakan
(.....)
Hamrun

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 105640194214

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiatis dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Januari 2021

Yang Menyatakan,

Ardiansyah

ABSTRAK

Ardiansyah. 2020. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Burhanuddin)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata hutan Mangrove Tongke-Tongke kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif. Data penelitian dikumpul dengan menggunakan metode wawancara 9 Informan. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai motivator, dinamisator dan Fasilitator (1) peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terealisasi sebagian dilapangan seperti area tracking, gazebo, toilet dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa peran pemerintah sangat serius dalam mengembangkan kawasan wisata ini sebagai pusat wisata dan penelitian mangrove di Kabupaten Sinjai dengan cara mengalokasikan anggaran pembangunan disektor pariwisata agar dapat berkembang dan sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat sekitar. (2) Peran pemerintah sebagai Motivator, untuk menjembatani kepentingan public dan kepentingan swasta agar berjalan wajar tanpa merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Peran pemerintah selaku motivator telah terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini, setiap pertemuan antara pihak pemerintah dan masyarakat, dimana dinas pariwisata selalu mendorong masyarakat agar meningkatkan kreatifitas dibidang ekonomi kreatif. (3) Peran pemerintah sebagai dinamisator, kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat dilihat dalam proses pelestarian hutan mangrove seperti kawasan pembibitan dan penanaman yang turut melibatkan langsung antara dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas lingkungan hidup serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove tersebut. Sinergitas antara pihak pemerintah dan pihak swasta dilihat keterlibatan pihak BI dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke yaitu memberikan support berupa anggaran biaya pembangunan guna memasimalkan pengembangan wisata hutan mangrove agar sesuai visi, misi dan tujuan dari pengembangannya.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Hutan, Mangrove

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil' Alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Sang maha kuasa yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Sang Maha Pemurah yang melimpahkan segala nikmat hidup, rejeki, ilmu, serta kasih sayang-Nya pada makhluk-Nya. Sang maha pengasih dan penyayang yang selalu menghiasi kehidupan dengan jutaan rasa cinta yang mendamaikan bumi dan seisinya. Kesemuanya itu merupakan bukti keagungan sang Maha Pencipta, Allah SWT. Berkat sentuhan dan Percikan setetes dari keluasan lautan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada manusia utusan Allah SWT, Muhammad SAW, sang pembawa cahaya dari yang gelap gulita menjadi alam yang terang. Behaulah pejuang dan panutan sejati dunia akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga ditulis untuk menjadi bahan referensi pembaca ataupun penulis selanjutnya. Skripsi ini berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai”**, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala usaha, bimbingan, dorongan motivasi, semangat dan kasih sayang dari orang-orang yang mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda M. Darwis Patang dan Ibunda Hj Ramlah atas segala limpahan kasih

sayang, semangat dan dorongan serta didikannya juga senantiasa tak henti-hentinya mendoakan sehingga menjadikan motivasi untuk penulis. Serta saudara-saudaraku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada ibu **Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II, yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang begitu tulus dalam membantu penulis. Dan tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si Selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.P, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis serta memberikan informasi

6. Kepada para narasumber/informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama melakukan penelitian.
7. Teristimewa untuk kakak saya Ernita Purnamasari dan Adi Haidir Putra yang telah membantu saya dari segi materi maupun moril dari awal proses memasuki bangku kuliah sampai selesai.
8. Teman dekat penulis Andi Siska dan Koesheryanto yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta menemani penulis dalam suka maupun duka.
9. Teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2014 yang telah menemani selama perkuliahan sampai sekarang
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat Ridha dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat kepada setiap pembaca. Amin.

Makassar, 27 Januari 2021

Penulis



ARDIANSYAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMA TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pemerintah.....	10
C. Pariwisata dan Kepariwisataan	13
D. Hutan Mangrove.....	18
E. Kerangka Pikir	19
F. Fokus Penelitian	20
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	23
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24

F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Teknik Pengabsahan Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	32
C. Karakteristik Wilayah Desa Tongke-Tongke	35
D. Potensi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	39
E. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Sebagai Objek Wisata	43
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62
RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1	30
Tabel 2	31
Tabel 3	36
Tabel 4	39
Tabel 5	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan menjadi salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensial dan andil besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sektor pariwisata di Indonesia hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastuktur, keamanan dan *management* yang baik agar mampu menciptakan sektor pariwisata yang diminati wisatawan lokal maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan Negara.

Sekarang ini, kedudukan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan devisa negara sebagai pendukung komoditi ekspor migas ataupun non-migas. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan devisa negara dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumber daya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya. Dalam upaya pengembangan pembangunan pariwisata yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten Sinjai berusaha

meningkatkan citra positif daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya atau potensi pariwisata yang dimiliki.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perananya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut. Pembangunan Kepariwisataan di daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal.

Kabupaten Sinjai merupakan kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sinjai memiliki potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Salah satu objek wisata andalan Kabupaten Sinjai yaitu kawasan Hutan Magrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur merupakan sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan serta dipasarkan. Wilayah di Kabupaten Sinjai yang masih memiliki hutan mangrove yang cukup luas adalah Desa Tongke-Tongke dan Kelurahan Samataring. Luas hutan di Kelurahan Tongke-Tongke merupakan

hutan terluas yang ada di Kabupaten Sinjai, termasuk hutan mangrovenya. Menyadari akan pentingnya manfaat hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat khususnya daerah pesisir, baik manfaat langsung maupun tidak langsung, maka sumberdaya hutan mangrove harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Desa Tongke-tongke merupakan salah satu dari lima desa di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai. Desa Tongke-Tongke namanya sempat menasional ketika penghargaan bidang lingkungan yakni Kalpataru diberikan pada pemrakarsa hutan mangrove (bakau) H. Taiyeb pada era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1995. Sejak saat itu, nama Desa Tongke-Tongke berikut hutan bakauanya mulai dikenal dan menjadi perbincangan di tingkat nasional sebagai contoh yang patut direplikasi oleh daerah pesisir lainnya di Indonesia.

Hutan Mangrove Tongke-Tongke Memiliki potensi wisata lebih namun dalam pengembangannya pemerintah daerah harus lebih memperhatikan banyak hal khususnya Pemerintah Dinas Pariwisata yang mengelola dan memiliki wewenang untuk pengelolaan dan pengembangnya dan dalam pengelolaannya pemerintah sudah membentuk kelompok dengan nama POKJA DARWIS (Kelompok Kerja Sadar Wisata). Pengembangan tempat wisata seperti Hutan Mangrove Tongke- Tongke ini sangat perlu perhatian yang lebih besar dari pemerintah dengan mendekatkan diri kepada masyarakat setempat dan melibatkannya dalam mengelola wisata hutan mangrove. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana hutan mangrove ini dapat menarik

wisatan lokal maupun dari luar dengan tetap menjaga kelestarian hutan mangrove dengan melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan dan bimbingan dalam mengembangkan kreativitas warga dalam mengelola lokasi wisata hutan mangrove dan tetap menjaga kelestariannya seperti memberikan arahan tentang pembatasan penebangan hutan mangrove.

Salah satu yang menjadi kelemahan dari kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke , yaitu kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah yaitu kurangnya tempat sampah yang ditempatkan pada setiap sudut agar wisatawan tidak membuang sampah sembarangan, fasilitas umum yang kurang memadai dilihat dari belum tersedianya toilet umum yang memenuhi standar kelayakan untuk wisatawan dan tidak adanya transportasi umum yang bisa langsung diakses wisatawan menuju ke destinasi wisata. Pemerintah sebagai fasilitator masih perlu untuk mengembangkan fasilitas agar wisatawan dapat berwisata dengan nyaman dengan bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan orang-orang yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Sekalian dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Resky Sirupang Kanuna (2014).

Dapat dilihat dari lokasi sekitar wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke masyarakat di sana kurang ikut berpatisipasi dalam pembangunannya karena pemerintah sebagai dinamisator kurang membangun sinergi ke masyarakat. Dengan adanya sinergi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat maka peran pemerintah sebagai fasilitator dan motivator yang berkaitan

dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pengembangan sektor pariwisata mulai menampakkan kemajuan yang ditunjang dari beberapa peran pemuda lokal dalam mempromosikan lewat media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Youtube*. Kegiatan kepemudaan seperti itu membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah sebagai sebuah upaya berkesinambungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dan kreatifitas pemuda Sinjai terutama pemuda yang tinggal disekitaran Hutan Mangrove untuk memperkenalkan lokasi wisata Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Resky Sirupang Kanuna (2014) meneliti mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Karena di Kabupaten Toraja Utara memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dikelolah dan dikembangkan dengan baik dan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Mengacu dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam mengembangkan Kawasan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai ?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai Motivator dalam mengembangkan Kawasan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai ?
3. Bagaimana peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam mengembangkan Kawasan Hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebenarnya untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, untuk itu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam mengembangkan Kawasan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai
2. Peran pemerintah sebagai Motivator dalam mengembangkan Kawasan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.
3. Peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam mengembangkan Kawasan Hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya memberikan hasil yang dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat manambah khazanah pengetahuan atau sebagai bahan informasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove untuk memperkenalkan wisata mangrove di Kabupaten Sinjai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat menjadi motivasi setempat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai upaya mengatasi masalah secara mandiri yang tentunya di topang oleh program-program pemerintah.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan jadi bahan pertimbangan terhadap pelestarian pariwisata, baik pemerintah Desa maupun pemerintah Kabupaten.

c. Bagi lembaga terkait

Sebagai sumber data atau bentuk masukan bagi pemerintah sehingga dapat mempercepat penanggulangan masyarakat dalam mengelolah kawasan wisata hutan mangrove.

d. Bagi peneliti

Sebagai latihan untuk menyusun buah pikiran secara tertulis dan sistematik dalam bentuk karya ilmiah dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Wisata:

1. (Amal Arfan, dkk. 2017) Peranan Pemerintah, Masyarakat dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Tongke Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Peranan pemerintah dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove Desa Tongke-tongke terutama SKPD yang terkait sejauh ini terus melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pengetahuan perlindungan hutan mangrove, pengawasan dan kontrol terhadap kawasan tersebut sedangkan masyarakat Desa Tongke-tongke yang melakukan penanaman mangrove secara swadaya sejauh ini belum mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan mangrove. Kemudian Strategi alternatif pengelolaan berkelanjutan ekowisata mangrove yang diprioritaskan di kawasan ekowisata mangrove Desa Tongke-tongke adalah: a) Meningkatkan koordinasi pemerintah,masyarakat dan pengelola dalam mengembangkan ekowisata. b) Melibatkan masyarakat dalam setiap pengelolaan ekowisata mangrove. c) Membuat dan mengaplikasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam perlindungan ekosistem mangrove.

2. (Salim, Tamrin. dkk. 2018) Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai. Persepsi wisatawan secara umum mendukung dan menginginkan pengembangan wisata hutan mangrove Tongke-Tongke sebagai kawasan ekowisata. Dalam pengembangannya wisatawan juga memberikan saran antara lain dari: (a) Aspek aksesibilitas jalan perlu diperbaiki kondisi jalan yang rusak dan berlubang, (b) Aspek sarana prasarana perlu ditambah dan ditata sesuai kegiatan ekowisata, (c) Aspek objek dan daya tarik wisata perlu dipertahankan panorama hutan mangrovanya , (d) Aspek pengelolaan perlu adanya pemandu wisata dan juga promosi wisata yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan mangrove Tongke-Tongke sebagai kawasan ekowisata meliputi: sarana prasarana, pengelolaan, keterlibatan masyarakat dalam usaha wisata, dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Strategi pengembangan ekowisata mangrove Tongke-Tongke yang menjadi prioritas utama berada pada kuadran 1 (strategi S-O). Strategi yang dirumuskan pada kuadran 1 meliputi : (a) Mengoptimalkan daya tarik wisata mangrove Tongke-Tongke dengan tetap mempertahankan kealamian potensinya, (b) Meningkatkan pelatihan kepada masyarakat dalam bidang pariwisata, (c) Melakukan pembinaan terhadap pengelola, dan (d) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai.

Dari kedua penelitian di atas, dapat dilihat ambil kesimpulan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah subjek

dan penelitiannya. Kedua penelitian diatas juga memang meneliti Kawasan Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, namun perbedaannya kedua penelitian diatas berfokus pada strategi pengembangannya dan peranan masyarakatnya. Berbeda halnya dengan peneliti yang berfokus pada peranan dari pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pengembangannya.

B. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Menurut W. S. Sayre pengertian pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Robert Mac Iver mengemukakan bahwa pengertian pemerintah merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa di perintah. Samuel Edwar mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.

Dari pengertian pemerintah yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.

Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Sinjai mengemukakan bahwa keterlibatan pemerintah daerah Sinjai khususnya Dinas Pariwisata dalam mendukung kegiatan pariwisata yaitu dengan penetapan Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang retribusi karcis. Selain penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2017, dari aspek sarana prasarana wisata pemerintah daerah telah membangun jembatan tracking, pondok informasi, dan menyediakan tempat sampah, membangun gerbang wisata, dan membuat papan penunjuk arah bagi wisatawan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan ekowisata mangrove juga dapat dilakukan dengan penanaman bibit mangrove, melengkapi sarana dan prasarana, area parkir, dan melakukan kerjasama yang antara pemerintah, masyarakat maupun swasta (Novianti, 2016). Dari aspek pengelolaan dan peningkataan kapasitas masyarakat pemerintah daerah melakukan pendampingan kepada Kelompok Sadar Wisata ACI sebagai pihak pengelola, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan mendampingi wisatawan yang melakukan penelitian. Menurut Pramesuary dkk (2015) dukungan pemerintah dalam pengembangan ekowisata diwujudkan dengan kegiatan berupa program pengembangan sarana prasarana wisata, program peningkatan ekonomi melalui pinjaman modal kepada masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pelestarian lingkungan hidup, membentuk kelembagaan sebagai pengelola dan pelatihan pemandu wisata. Meskipun ada dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, namun keterbatasan anggaran dalam pengelolaan dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dapat menjadi ancaman dalam pengembangan mangrove Tongke-Tongke sebagai kawasan ekowisata.

Mengacu pada penjelasan di atas, Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Adapun pada prakteknya pemerintah bias mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

C. Pariwisata, dan Kepariwisataan

1. Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna rekreasi dan untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pariwisata Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009 pasal 1 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. UU ini menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

2. Kepariwisataan

Kepariwisataan Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009 pasal 1 adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Menurut Muljadi dan Warman (2014) prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang mendukung sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan dalam memenuhi kebutuhan

mereka, antara lain:

- 1) Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan stasiun kereta api.
 - 2) Instalasi tenaga listrik dan instalasi air bersih.
 - 3) Sistem perbankan moneter Sistem telekomunikasi.
3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Pengembangan pariwisata adalah agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu kawasan wisata, lebih lama tinggal, dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang mereka kunjungi sehingga dapat menambah devisa untuk negara bagi wisatawan asing, dan menambah pendapatan asli daerah untuk wisatawan lokal. Di samping itu juga bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata tersebut. Sehingga, keuntungan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh penduduk sekitar khususnya.

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan (Sobari dalam Anindita, 2015), yaitu:

- 1) Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
- 2) Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
- 3) Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
- 4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.

Selain daya tarik alami, suatu obyek wisata memiliki daya tarik buatan manusia (man made attraction). Menurut Santoso dalam Kurniawan (2015) unsur-unsur pengembangan pariwisata meliputi:

1) Attraksi

Attraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya).

2) Transportasi

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan. Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih singkat).

3) Akomodasi

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang diadakan khusus peorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.

4) Fasilitas Pelayanan

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan

pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

5) Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

4. Kawasan Wisata

Kawasan merupakan daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan, perdagangan dan kawasan rekreasi. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kawasan Wisata bila dilihat dari segi struktur kata-nya terdiri dari dua kata dasar, yaitu Kawasan dan juga Wisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat (2008), masing-masing definisi dari kata-kata diatas adalah sebagai berikut; Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri. Sedangkan untuk Wisata yaitu bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang). Dan jika digabungkan kedua definisi kata tersebut maka Kawasan Wisata dapat diartikan sebagai Daerah tertentu yang mempunyai ciri sebagai tempat tujuan bepergian bersama-sama baik untuk memperluas pengetahuan ataupun bersenang-senang dan lain sebagainya.

D. Hutan Mangrove

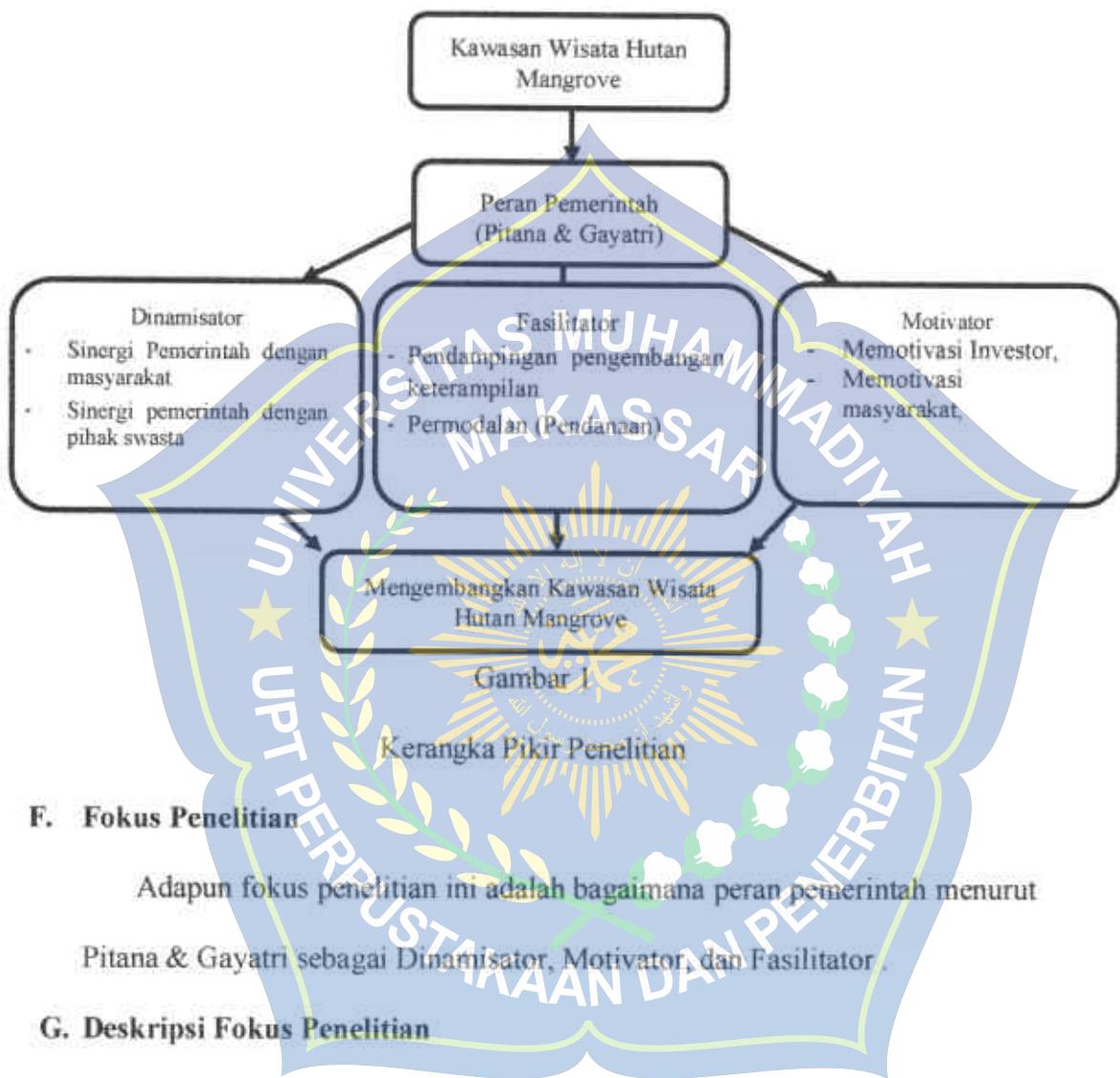
Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang mempunyai peranan penting ditinjau dari sisi ekologis maupun aspek sosial ekonomi. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang ditumbuhi dengan pohon bakau (mangrove) yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Hogarth, 1999). Hutan mangrove mempunyai fungsi ganda dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan (Waas dan Nababan, 2010). Sebagai suatu ekosistem dan sumberdaya alam, pemanfaatan mangrove diarahkan untuk kesejahteraan ummat manusia dan untuk mewujudkan pemanfaatannya agar dapat berkelanjutan, maka ekosistem mangrove perlu dikelola dan dijaga keberadaannya.

Kerangka pengelolaan hutan mangrove terdapat dua konsep utama. Pertama, perlindungan hutan mangrove yaitu suatu upaya perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. Kedua, rehabilitasi hutan mangrove yaitu kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulu merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, tetapi yang paling utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove yang telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain.

E. Kerangka Pikir

Kehadiran pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai dirasa sangat penting. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran pemerintah setempat untuk mengembangkan kawasan wisata hutan mangrove, dan dalam pengembangannya pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada agan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah menurut Pitana & Gayatri sebagai Dinamisator, Motivator, dan Fasilitator.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.
 - Sinergi pemerintah dengan masyarakat adalah pemerintah bersatu dengan masyarakat dalam memgembangkan objek wisata.

- Sinergi pemerintah dengan pihak swasta adalah membangun kerjasama dengan swasta agar anggaran dapat dibantu dari pihak swasta.
2. Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
- Pendampingan (pelatihan) adalah pemerintah mendampingi masyarakat dalam mengasah keterampilan melalui berbagai pelatihan-pelatihan.
 - Permodalan (Pendanaan) adalah pemerintah mengawali pembangunan lokasi objek wisata dengan menyediakan dana dari anggaran daerah maupun dari pihak swasta.
3. Motivator adalah pemerintah (penggerak) yang dapat menyebabkan timbulnya dorongan atau motivasi.
- Memotivasi masyarakat adalah memberikan dorongan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas.
 - Memotivasi Investor adalah memberikan dorongan kepada investor agar tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam pembangunan objek wisata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian selama 1 bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, dengan disertai dasar pertimbangan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peranan penting dalam mengembangkan kawasan wisata hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara ilmiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penggunaan metode ini diharapakan dapat menjelaskan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang tampak.

Dan logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka **intersubjektivitas** (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah objek penelitian yang selanjutnya akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan objektif di lapangan.
2. Data sekunder, adalah data pendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara Purposive Sampling. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sumber informan merupakan informasi dari pemerintah dan seluruh elemen-elemen yang terkait dalam Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke.

Adapun informan yang diwawancara pada penelitian ini adalah:

- a. Informan Utama, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selaku penanggung jawab kawasan wisata Kabupaten Sinjai dalam hal ini kawasan hutan mangrove tongke-tongke, 6 Orang (Kepala Dinas, Sekertaris, dan beberapa Kepala Bidang)
- b. Informan tambahan, yaitu 6 Orang warga yang bermukim sekitara kawasan hutan mangrove tongke-tongke.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung peneliti di lapangan sebelum melakukan penelitian.
2. Wawancara adalah kegiatan dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka dalam suatu teknik in depth interview (wawancara mendalam), sehingga memungkinkan bagi sumber informasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jawaban yang diberikannya berkaitan dengan topic penelitian. Melalui teknik ini akan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya untuk selanjutnya dilakukan analisis dan semakin melengkapi fakta dan data yang tersedia.

3. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi berupa data yang berasal dari arsip, laporan, termasuk data yang terdapat di instansi-instansi terkait dan dokumen tertulis lainnya seperti literature-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014:246) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

3. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat yang dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiyono (2014:273) triangulasi dalam pengujian Kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada beberapa sumber, yang telah diperoleh untuk menguji kredibilitas data. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan,

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 23 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai Timur Bagian Selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 Km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan).

Secara geografis Kabupaten Sinjai merupakan salah satu pemerintahan daerah (Kabupaten) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Sinjai Utara. Secara geografis, lokasi wilayah Kabupaten Sinjai berada pada posisi $5^{\circ} 2' 56''$ - $5^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 56' 30''$ - $120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur (BT).

Secara morfologi, daerah ini lebih dari 55,5% terdiri dari daerah dataran tinggi (100-500 meter dari permukaan laut). Berdasarkan data DEM SRTM resolusi 30 meter, ketinggian wilayah Kabupaten Sinjai berkisar antara 0 - 2821 meter (paling tinggi di sekitar Gunung Bawakaraeng). Sekitar 85% wilayah Kabupaten ini adalah medan berbukit, bergelombang sampai bergunung. Luas wilayah Kabupaten Sinjai adalah $819,96\text{km}^2$, yang secara administratif, terbagi menjadi 9 kecamatan definitif. Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir adalah Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Tellulimpoe. Sedangkan Kecamatan Sinjai Barat merupakan kecamatan

paling barat dan berada di kaki Gunung Bawakaraeng, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Wilayah Kabupaten Sinjai berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bone di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Secara ekonomi daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedang jalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah diluar Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi Kabupaten Sinjai untuk tahun 2013–2018 adalah terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah $819,96 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 9 kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupodo dan Kecamatan Pulau Sembilan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Sinjai Timur

Sinjai Timur mempunyai arti satu jahitan di sebelah Timur dan rasa kekeluargaan masyarakat terjalin dengan erat yang akhirnya menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Sinjai Timur yang ibukota Kecamatanya terletak di Samataring Kecamatan Sinjai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Kecamatan Sinjai Timur yang terletak di Kelurahan Samataring dengan koordinat Geografis

berada pada $5^{\circ}8'30''$ LS dan $120^{\circ}15'40''$ BT. Kecamatan Sinjai Timur berada pada kategori lokasi dataran pesisir dan pegunungan yang mempunyai jarak tempuh 4 km dari Ibu kota Kecamatan ke Ibu kota Kabupaten.

Secara administrasi jumlah Desa dan Kelurahan Kecamatan Sinjai Timur terdiri dari 1 kelurahan dan 13 Desa. Adapun jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk pada tahun 2018 dari 13 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

	KELURAHAN/DESA	Penduduk	Luas (KM ²)	Kepadatan per (KM ²)
1	ESA	2	3	4
01	BIRORO	2128	5,97	356,15
02	LASIAI	2006	7,14	280,95
03	SANJAI	3023	8,20	368,66
04	PASIMARANNU	1973	3,40	580,29
05	PATTALASSANG	2071	7,50	276,13
06	PANAIKANG	1875	4,72	397,25
07	SAMATARING	4284	4,50	952,00
08	KALOLING	1697	5,09	333,40
09	SAUKANG	2367	6,00	394,50

10	KAMPALA	2644	6,09	434,15
11	TONGKE-TONGKE	4287	4,75	505,28
12	SALOHE	1627	5,22	189,43
13	BONGKI LENGKESE	1004	5,30	431,08
	JUMLAH	30986	71,38	5499,57

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2019

Tabel 2

Jumlah Penduduk Per Kelurahan/Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

DESA/ KELURAHAN		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01	BIRORO	1034	1098	2132
02	LASIAI	921	1085	2006
03	SANJAI	1385	1638	3023
04	PASIMARANNU	954	1019	1973
05	PATTALASSANG	993	1078	2071
06	PANAIKANG	852	1023	1875
07	SAMATARING	2024	2260	4284
08	KALOLING	820	877	1697
09	SAUKANG	1133	1234	2367
10	KAMPALA	1212	1432	2644
11	TONGKE-TONGKE	2037	2250	4287
12	SALOHE	788	839	1627

10	KAMPALA	2644	6,09	434,15
11	TONGKE-TONGKE	4287	4,75	505,28
12	SALOHE	1627	5,22	189,43
13	BONGKI LENGKESE	1004	5,30	431,08
	JUMLAH	30986	71,88	5499,57

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2019

Tabel 2

Jumlah Penduduk Per Kelurahan/Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

DESA/ KELURAHAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01	BIRORO	1034	1098	2132
02	LASIAI	921	1085	2006
03	SANJAI	1385	1638	3023
04	PASIMARANNU	954	1019	1973
05	PATTALASSANG	993	1078	2071
06	PANAIKANG	852	1023	1875
07	SAMATARING	2024	2260	4284
08	KALOLING	820	877	1697
09	SAUKANG	1133	1234	2367
10	KAMPALA	1212	1432	2644
11	TONGKE-TONGKE	2037	2250	4287
12	SALOHE	788	839	1627

13	BONGKI LENGESE	472	532	1004
	JUMLAH	14625	16361	30986

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2019

Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah Desa Tongke-tongke dimana Desa tersebut memiliki jumlah penduduk 2.037 jiwa laki-laki dan perempuan 2.250 jiwa dengan jumlah penduduk keseluruhan 4.287 jiwa.

B. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai

a) Visi Misi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

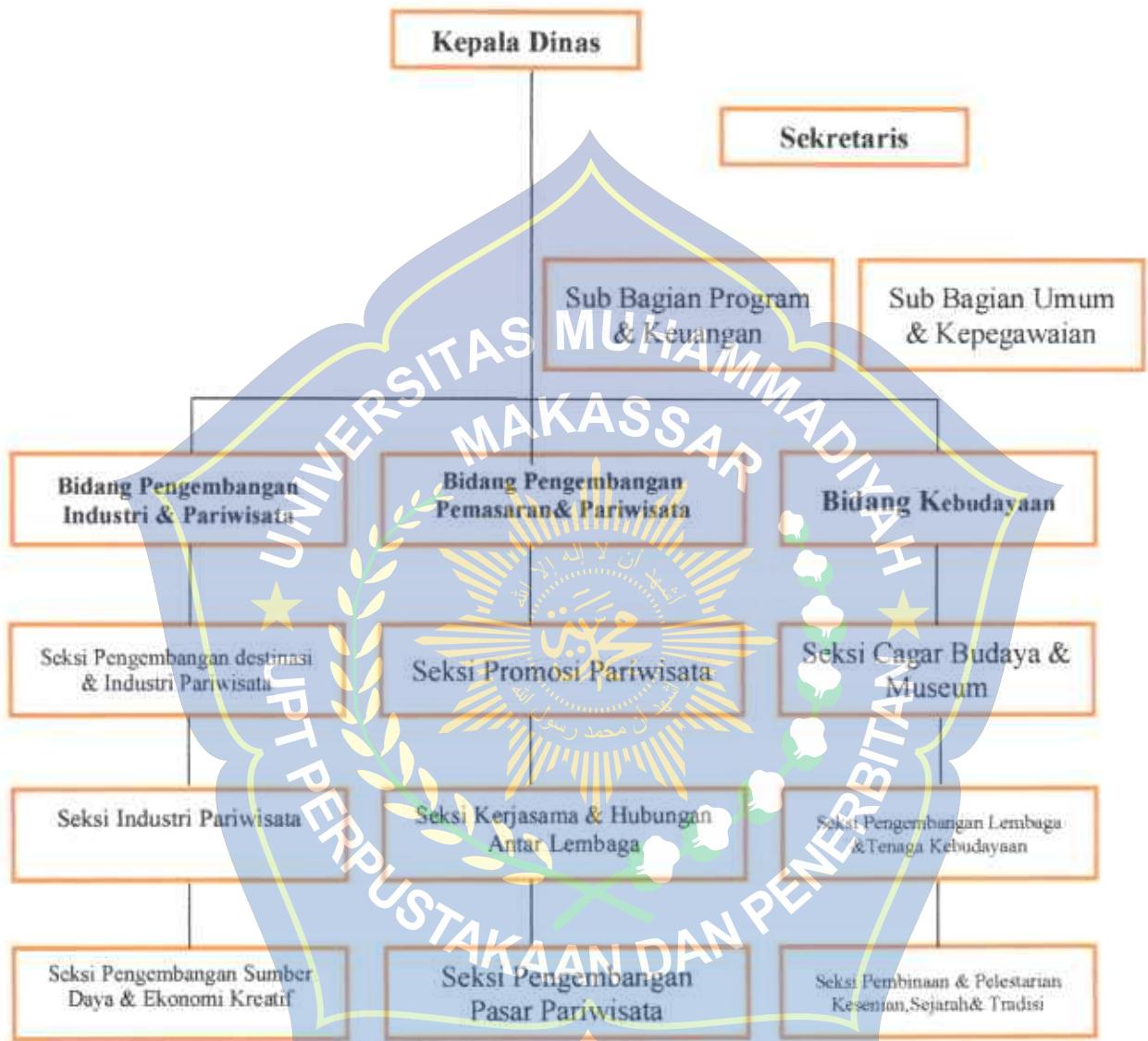
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menetapkan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merujuk pada pencapaian Misi Kabupaten Sinjai yaitu

“TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”

Berangkat dari uraian tersebut, maka Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pariwisata Sinjai yang berdaya Saing serta pelestarian Kebudayaan Menuju Masyarakat Sejahtera”

c. Struktur Organisasi



C. Karakteristik Wilayah Desa Tongke-Tongke

a. Letak Geografis

Desa Tongke-tongke adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Lokasi wilayah desa Tongke-tongke ini berada pada kurang lebih 7 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai dan berjarak 5 km dari pusat pemerintah Kota Kabupaten Sinjai. Kondisi geografisnya berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 0,5 meter dengan luas wilayah/area desa 117 Ha, yang terbagi atas 5 dusun yakni:

- 1) Dusun Bentengnge
- 2) Dusus Baccara
- 3) Dusun Maroanging
- 4) Dusun Babana dan
- 5) Dusun Cempae

Secara administrasi desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai memiliki batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Samataring
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bone
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panaikang
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaloling

Secara umum iklim di Desa Tongke-Tongke dengan curah hujan 2.813,00 mm/Tahun, jumlah bulan hujan rata-rata 4 bulan/Tahun, suhu rata-

rata harian $25,00^{\circ}\text{C}$, tinggi tempat dari permukaan laut 0,500 mdl. Adapun jenis dan kesuburan tanah sebagian besar berwarna abu-abu dengan tekstur tanah pasiran.

Secara Topografi Desa Tongke-Tongke merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut $\pm 0-500$ Mdpl, dengan luas wilayah $\pm 4,75 \text{ Km}^2$ ¹⁰. Berdasarkan data profil Desa Tahun 2017 maka diperoleh data komposisi peruntukan lahan sebagai berikut:

Tabel 3
posisi peruntukan lahan tahun 2019.

No.	Kualifikasi	Luas
1.	Pemukiman	15000 m^2
2.	Perkantoran	1000 m^2
3.	Sawah Tadah hujan	2.908,33 Are
4.	Perkebunan	2.631,39 Are
5.	Tambak	34.680,20 Are
6.	Panjang Garis Pantai	1 Km
7.	Hutan Mangrove (Bakau)	326.612,89 Are
8	Hutan Nipah	500Ter

Sumber : Profil Desa Tahun 2019

b. Sejarah Hutan Mangrove Desa Tongke-Tongke

Secara historis tahun 1920-an Balang Deaeng Maketti adalah seorang yang pertama membangun kampong dan mendirikan soraja di Cemape, beliau

merupakan salah seorang keturunan Minahan Dg Sutte, dia bersaudara sepupu dengan Arung Baringeng Mapa-pasang Dg Patappu, beliau juga yang pertama membuka lahan pertambakan di Cempae. Kata Tongke-Tongke kata Dasarnya adalah "Toke" Kata toke dipakai untuk panggilan pedagang Asal China yang tinggal di Cempae kerena terkenalnya Kampung Cempae sebagai tempat Singgahnya para toke maka orang sekitar lambat laun menyebut kampung Toke menjadi "Tongke-Tongke" yang tidak hanya dihuni warga asal China akan tetapi juga Suku Bugis. Karena letak geografis dan kondisi alamnya yang strategis sehingga tentara Jepang menjadikan Tongke- Tongke menjadi basis pertahanan terutama di daerah Bentengnge oleh tentara Jepang menjadikan pos pertahanan dan membentuk tentara Heiho, kekalahan Jepang terhadap sekutu sehingga mengungsi ke manipi.

Masyarakat pada saat itu belum bisa menetap di kampung halamannya yaitu di Desa Tongke-tongke karena keamanan belum membaik, baik dari ancaman gelombang pasang yang sewaktu-waktu dapat menerjang pemukiman warga setempat.

Pada Tahun 1955-an terjadi abrasi pantai kurang lebih 15 meter per Tahun dan mengancam perkampungan serta seluruh tambak di sepanjang pantai tongke- tongke. Tahun 1960-1962 kondisi keamanan mulai membaik, sebagian masyarakat kembali ke Tongke-Tongke menata kampungnya setelah keamanan dianggap benar- benar pulih. Maka Pemerintah membagi Tongke-Tongke menjadi dua Dusun yakni Dusun Tongke-Tongke dan Dusun maroanging. Perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun mendorong

Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga Pada Tahun 1970 Pemerintah bersama masyarakat sepakat untuk mendirikan sekolah dasar. Setelah pemerintah membagi Desa Tongke-tongke menjadi dua dusun, masyarakat setempat mulai menata kembali Desa mereka, dengan bantuan dari Pemerintah dan swadaya masyarakat.

Pada tahun 1980-an oleh masyarakat Desa dilakukanlah penanaman bakau yang tinggal disekitar pesisir. Kawasan hutan bakau Tongke-tongke merupakan salah satu dari beberapa titik kawasan hutan bakau yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai. Terletak di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur, kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri dalam hal pengembangan kawasan mangrove sekaligus keterkaitannya dengan kepariwisataan dan pengembangan perikanan di Kabupaten Sinjai.

Pengembangan hutan bakau di Kabupaten Sinjai secara umum dan di Desa Tongke-tongke adalah proses dimulainya yang merupakan murni swadaya dari masyarakat. Ekosistem Hutan bakau di Kabupaten Sinjai seluas 1.157 Ha dikenal terbangun dan berkembang berawal dari partisipasi masyarakat pesisir pantai secara swadaya mengembangkan bakau sejak tahun 1980an sampai Sekarang.

Pengembangan hutan bakau di Kabupaten Sinjai secara umum dan di Desa Tongke-tongke adalah proses dimulainya yang merupakan murni swadaya dari masyarakat. Ekosistem Hutan bakau di Kabupaten Sinjai seluas 1.157 Ha dikenal terbangun dan berkembang berawal dari partisipasi masyarakat pesisir pantai secara swadaya mengembangkan bakau sejak tahun

1930 sampai Sekarang.

Perkembangan lainnya yaitu pengaspalan jalan poros Samataring ke pemukiman pesisir Tongke-tongke, keberhasilan lainnya dapat dilihat dari prestasi masyarakat dengan menerima penghargaan kalpataru yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (H. M. Soeharto) pada Tahun 1995 kepada bapak H. Muh. Tayyeb sebagai Tokoh perintis hutan bakau dan juga sebagai Ketua Kelompok Aku Cinta Indonesia (ACI), kemudian ditahun 2001 bapak H. Muh. Tayyeb kembali menerima penghargaan yang sama dari Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri.

Adapun model promosi kawasan wisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten sinjai yaitu:

Tabel 4

No.	Model Promosi	Hasil Promosi	
		baik	tidak
1.	Social media (IG, Facebook, Youtube)	✓	-
2.	Internet (Google)	✓	-
3.	Media Cetak (Koran)	✓	-
4.	Siaran Televisi (Sinjai TV)	✓	-

D. Potensi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa potensi terbesar dalam kawasan wisata Tongke-Tongke ini adalah area hutan mangrove itu sendiri. Karena kesuburan tanah di desa Tongke-Tongke sehingga mangrove di desa Tongke-Tongke ini bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Selain dari fungsi melindungi area desa dari

abiasi dan angin kencang dan menjadi kawasan wisata, hutan mangrove ini juga menjadi pusat penelitian mangrove. International Cooperation Agency (JICA) dan Ausaid karena keindahan alam dan biota laut. Kekayaan alam di Tongke-tongke ini kemudian lebih dikenal dengan Laboratorium Alam Sulawesi Selatan. Di sana kemudian dijadikan sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) pada tahun 2015. Setelah itu, mulai intens para peneliti mulai dari kalangan mahasiswa S1,S2 sampai S3 untuk meneliti kawasan hutan mangrove ini. Jadi potensi terbesar kawasan wisata ini adalah mangrove itu sendiri, maka dari itu perlunya pengelolaan yang berbasis lingkungan itu sangat penting guna menjaga fungsi asli dari hutan mangrove itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan hutan bakau sebagai objek wisata di Desa Tongke-tongke adalah Kebijakan pengembangan produk wisata dilakukan secara harmonisasi dalam artian bahwa pengembangannya bernuansa lingkungan hidup yaitu pengembangan wisata tanpa mengesampingkan fungsi hutan, adat istiadat dan budaya lokal (kearifan lokal). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata kawasan hutan mangrove demi mengoptimalkan kawasan wisata ini agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan maupun peneliti baik lokal sampai mancanegara.

1. Aksesibilitas

Untuk menjangkau kawasan wisata ini dari kota-kota besar seperti Makassar, Gowa, Bone dan Bulukumba tidaklah sulit namun ada beberapa

kendala wisatawan dengan jauhnya jarak tempuh seperti melewati jalur Makassar- Bulukumba 220 km dengan waktu tempuh sekitar 6-7 jam, sedangkan melewati Makassar-Maros-bone berjarak 186 km dengan waktu tempuh 4 jam dan sementara melewati Makassar-Gowa berjarak 164 km dengan waktu tempuh 3 jam, dari ibu kota berjarak 7 km bisa menggunakan kendaraan umum sambil menulusuri jalan aspal mulus, melewati perkampungan khas nelayan dengan berbagai perahu dan tambak. Kendala lain yang harus diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah yaitu kondisi jalan di dalam desa Tongke-tongke itu sendiri, karena masih ada beberapa titik dengan kondisi jalan rusak ringan hingga rusak sedang seperti jalan berlubang. Ini merupakan salah satu aspek penunjang yang tentunya harus dimaksimalkan baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.

2. Fasilitas

Ada sekitar 20 rencana pengadaan fasilitas di kawasan wisata hutan mangrove oleh pemerintah. Sampai saat ini, kawasan wisata hutan mangrove Tongke-tongke terus berupaya meningkatkan pengembangan kawasan wisata terutama fasilitas yang ada, guna menarik minat wisatawan.

Tabel 5

Daftar rencana fasilitas yang telah ada saat ini

Fasilitas	Keberadaan		Kelayakan		Jumlah
Pintu Gerbang	Ada		Layak		1
Tracking Mangrove	Ada		Layak		
Gazebo	Ada		Layak		11

Kantor Pengelola	Ada		Layak		1
Genset		Belum ada			
Pondok Informasi	Ada		Layak		1
Mushollah	Ada		Layak		1
Playground		Belum ada			
Souvenir Shop		Belum ada			
Cafetaria	Ada		Layak		3
Menara Pengawas		Belum ada			
Cottage		Belum ada			
Dermaga Wisata Perahu	Ada		Layak		1
Dermaga Utama	Ada		Layak		1
Area Pemancingan		Belum ada			
Area pembibitan	Ada		Layak		2
Parkir Pengelola	Ada		Layak		1
Parkir pengunjung	Ada		Layak		1

Kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke Kabupaten Sinjai sangat nyata dijumpai pada saat pengunjung masih dari kejauhan hamparan hutan mangrove yang sangat lebat terlihat dengan sangat jelas. Keunggulan Hutan

Mangrove itu sangat banyak sekali pertama yaitu melindungi daerah pesisir dari abrasi, banjir rob, dan kerap kali datang hantaman ombak yang tinggi. Pengunjung juga dapat menikmati berada di tengah-tengah hutan mangrove karena telah disediakan jalan setapak yang terbuat dari papan yang Nampak seperti jembatan yang mengarahkan pengunjung menuju ketengah laut dan melihat pemandangan yang sangat indah. Kini juga telah disediakan wahana bebek air jadi pengunjung tidak hanya penikmati pemandangan tetapi juga dapat bermain. Kawasan wisata hutan mangrove Tongke-tongke kabupaten Sinjai juga termasuk sebagai hutan mangrove terluas dan rapat yang dimiliki oleh Indonesia.

E. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Hutan Mangrove Tongke-tongke Sebagai Objek Wisata

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Pengembangan kawasan hutan bakau atau hutan mangrove tongke-tongke sebagai objek wisata unggulan di Kabupaten Sinjai tak terlepas dari sinergi antara pihak masyarakat dan pihak pemerintah.

Merujuk pada teori tentang peran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 aspek, yaitu sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator.

1. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah selaku dinamisator yang bertanggung jawab penuh atas

semua kawasan objek wisata di Kabupaten Sinjai wajib melibatkan masyarakat dalam pengembangannya. Dalam pengembangan kawasan objek wisata di Kabupaten Sinjai, kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata tongke-tongke harus terjalin dengan baik guna mencapai tujuan awal perencanaannya. Hal itu bisa kita lihat sebagai berikut:

a. Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan penting dalam pengembangan kawasan wisata mangrove ini terutama mensinergikan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata mangrove. Hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai terkait sinergitas antar semua pihak adalah sebagai berikut:

“Untuk mensinergikan semua pihak, mulai dari pihak pemerintah, pihak masyarakat sampai pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan wisata hutan mangrove tongke-tongke yaitu kuncinya adalah komunikasi, seperti menjalin komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan berbagai elemen masyarakat desa tongke-tongke yang turut terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove. Kemajuan teknologi saat ini juga sangat mendukung jalannya komunikasi antar semua pihak, karena dengan teknologi semua informasi dapat dengan mudah disampaikan mulai dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas lingkungan Hidup sampai kepada masyarakat desa tongke-tongke”. (Wawancara, 15-06-2020).

Sementara menurut Kepala bidang Pengembangan Industri dan Pariwisata Kabupaten Sinjai dalam mensinergikan semua pihak yang terlibat dapat kita lihat dalam hasil wawancara berikut:

“Biasanya setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan seperti penanaman dan perawatan, selanjutnya kita komunikasi langsung kepada kelompok masyarakat. Kita himbau dan ajak mereka untuk ikut berpartisipasi ikut menanam pohon

bakau, dan kita kasi pengarahan kepada mereka tentang fungsi dan manfaat hutan bakau". (Wawancara, 15-06-2020).

Begitu pula persepsi masyarakat terhadap komunikasi yang dibangun oleh pemerintah perihal pengembangan kawasan wisata hutan mangrove ini. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yang tinggal disekitar kawasan wisata yaitu:

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan mangrove ini terutama dalam hal penanaman. Terima kasih kepada pemerintah telah melibatkan masyarakat dan semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan mangrove ini dan hasilnya bisa dinikmati sekarang. Karena selain dari tujuan wisatanya, rumah masyarakat disini juga terlindung dari abrasi, gelombang tinggi dan aman dari angin kencang” (Wawancara, 28-06-2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu masyarakat disekitar kawasan Tongke-Tongke, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai dinamisator sangat penting dalam mensinergikan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove ini.

Sementara dari hasil observasi lapangan peneliti dalam hal kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat disini dapat dilihat dalam proses pelestarian hutan mangrove seperti kawasan pembibitan dan penanaman yang turut melibatkan langsung antara dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas lingkungan hidup serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove tersebut seperti menanam sampai kegiatan kerja bakti bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan mangrove ini.

b. Sinergitas antara pihak pemerintah dan pihak swasta

Selain pihak masyarakat, pemerintah juga melibatkan pihak swasta dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke. Hasil wawancara antara peneliti dengan pihak pemerintah dalam hal ini kepala bidang Pengembangan Industri dan Pariwisata Kabupaten Sinjai dalam hal mensinergikan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta adalah sebagai berikut:

“Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke itu berupa sumbangsih anggaran untuk pembangunan, karena anggaran untuk pengembangan kawasan wisata hutan mangrove ini terbatas maka dibutuhkan tambahan biaya guna memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang guna mencapai visi, misi dari pengembangan kawasan hutan mangrove ini. Salah satu pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan kawasan hutan mangrove ini yaitu pihak Bank Indonesia (BI), dimana pihak BI turut memberikan sumbangsih berupa anggaran pembangunan agar pengembangan kawasan wisata ini lebih maksimal. Kunci utama dalam mensinergikan hubungan kerjasama antara pihak swasta dan pihak pemerintah yaitu komunikasi dan pengawasan dalam hal pengembangan kawasan” (Wawancara 01-07-2020).

Hasil observasi lapangan dalam hal sinergitas antara pihak pemerintah dan pihak swasta dapat dilihat dari segi area/zona dalam kawasan wisata hutan mangrove ini. Seperti kawasan *photobooth* yang tercantum spanduk Bank Indonesia (BI), data yang peneliti terima dari kepala bidang bagian keuangan dana bantuan BI yang masuk itu Rp. 400.000.000 hal itu dikarenakan efek dari keterlibatan pihak BI dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke yaitu memberikan support berupa anggaran biaya pembangunan guna memasimalkan pengembangan wisata hutan mangrove agar sesuai visi, misi dan tujuan dari pengembangannya.



Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

a. Pendampingan Pengembangan Keterampilan

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke ini karena tanpa adanya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengembangan wisata tongke-tongke ini, kawasan wisata ini tidak akan berkembang. Fasilitas sangat menunjang untuk perkembangan kawasan wisata guna tercapainya tujuan dari perencanaannya.

Hasil wawancara dengan pihak pemerintah selaku penanggung jawab dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai:

“Pembangunan fasilitas penunjang untuk kawasan wisata tongke-tongke sampai saat ini masih terus dipayangkan sesuai rencana awal yaitu sekitar 20 fasilitas yang akan dibuat. Beberapa diantaranya telah ada seperti gerbang masuk, mushollah, toilet cafeteria, tracking mangrove dll. Sebagian besar sumber dananya berasal dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. Untuk fasilitas yang belum ada, akan tetap diupayakan segera mungkin untuk dibangun agar wisatawan maupun peneliti mangrove makin tertarik dan merasa nyaman untuk berkunjung di kawasan hutan mangrove ini. Selain menyediakan fasilitas kawasan wisata, kami dari pemerintah juga menyediakan program pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, seperti program kegiatan pemandu wisata ekowisata yang diadakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang ditujukan untuk masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat”. (Wawancara, 20-06-2020).

Hasil dari wawancara dari Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai diperkuat oleh pernyataan masyarakat setempat dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“Masyarakat ikut andil dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke namun terlebih dahulu kami diberi bekal seperti pelatihan tata cara pembibitan sampai pada proses penanaman. Selanjutnya kami diberikan pelatihan menjadi pemandu wisata yang baik dan benar agar dapat lebih meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Karena dari kegiatan seperti itu dapat memberikan wadah bagi masyarakat

agar nantinya lebih terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata ini seperti area parkir, kantin, area pembudidayaan dan lain-lain” (Wawancara, 20-06-2020).

Pengembangan Sumber Daya Manusia kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke sangat berperan penting guna tercapainya sinergi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat nantinya. Sementara pengembangan fasilitas kawasan hutan mangrove tongke-tongke dapat dilihat pada tabel fasilitas sebelumnya serta dapat dinikmati sekarang ini walaupun belum semua terealisasikan dikarenakan adanya beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Namun, kendala tersebut tidak menyerutkan pengembangan kawasan wisata tongke-tongke ini dimana pihak pemerintah telah mentaktisinya dengan melibatkan pihak swasta sebagai salah satu investor agar pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tetap berjalan semaksimal mungkin agar tujuan dari pengembangannya tercapai.

b. Permodalan

Selain dari pengadaan fasilitas, pihak pemerintah juga menyediakan modal dalam bentuk wadah bagi masyarakat setempat yang ingin berwirausaha. Seperti yang dikatakan kepala bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yaitu :

“Pembangunan fasilitas kawasan wisata hutan mangrove ini, selain dari penunjang kawasan wisata melainkan juga untuk menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin berwirausaha didalam kawasan hutan mangrove, seperti pembangunan kantin, lahan parkir serta pusat area pusat kuliner yang disediakan oleh pemerintah. Tujuannya selain meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam berwirausaha.” (Wawancara, 05-07-2020).

pihak swasta. Sumbangsih berupa anggaran dari pihak swasta turut menunjang dalam pembangunan fasilitas kawasan wisata. Maka dari itu, kami selaku penanggung jawab kawasan wisata memberikan ruang untuk pihak swasta dalam pengembangan wisata tongke-tongke ini seperti area/zona *photobooth* yang bisa dimanfaatkan pihak swasta untuk memperkenalkan atau mempromosikan diri mereka seperti papan nama Bank Indonesia yang berada di area *photobooth* kawasan wisata hutan mangrove. Jadi begitu cara kami selaku penanggung jawab dalam mensinergikan semua pihak yang terlibat tanpa ada yang dirugikan demi tercapainya tujuan pengembangan wisata ini". (Wawancara, 20-06-2020).

Hasil observasi lapangan, peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terealisasi sebahagian dan bisa dilihat langsung dilapangan seperti area tracking, gazebo, toilet dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa peran pemerintah sangat serius dalam mengembangkan kawasan wisata ini sebagai pusat wisata dan penelitian mangrove di Kabupaten Sinjai dengan cara mengalokasikan anggaran pembangunan disektor pariwisata agar dapat berkembang dan sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat sekitar.



Gambar 4

Tracking mangrove (papan jalan mangrove)



Gambar 5

Gerbang masuk kawasan wisata

3. Pemerintah Sebagai Motivator

Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran sebagai motivator untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

a. Sinergitas Pihak Swasta dan Pihak Pemerintah sebagai Motivator

Selain masyarakat, pemerintah juga melibatkan pihak swasta dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove. Pemerintah gencar melakukan pemasaran ataupun promosi guna menarik perhatian maupun memotivasi pihak swasta agar terlibat dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke.

Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan pihak pemerintah sebagai berikut:

“untuk menarik perhatian pihak swasta, kami melakukan promosi melalui media guna memotivasi pihak swasta agar dapat bekerjasama dan bersinergi dalam mengembangkan kawasan wisata hutan mangrove ini. Kami saling memotivasi, dan untuk sinergitas yang kami dan pihak swasta lakukan dapat dilihat dari pengembangan fasilitas, karena pihak swasta memberikan

kontribusi berupa anggaran pembangunan dan kami selaku penanggung jawab kawasan memberikan ruang untuk mereka agar memperkenalkan maupun mempromosikan lembaga maupun perusahaan mereka sehingga terjalin simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta itu sendiri tanpa ada yang dirugikan”.

Pendapat diatas diperkuat oleh Kepala Destinasi Industri dan Pariwisata dalam wawancara mendalam yaitu

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memotivasi para pihak yang terlibat, mulai dari pihak masyarakat sampai pihak swasta itu sendiri. Bentuk motivasi terhadap pihak swasta dalam bentuk pemberian surat izin usaha kepariwisataan, diharapkan bahwa pihak swasta dapat bersinergi dengan pemerintah memberikan fasilitas yang nyaman dan aman bagi pengunjung tempat wisata untuk membantu memaksimalkan pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke ini.”

Sementara dari hasil observasi lapangan, bentuk motivasi dari pemerintah terhadap pihak swasta yaitu pemberian izin usaha (promosi) berupa terlibatnya pihak swasta seperti Bank Indonesia (BI) ditandai dengan adanya area/tempat promosi bagi BI dalam kawasan hutan mangrove tongke-tongke agar selain mempromosikan kawasan wisata mangrove, hal itu juga bertujuan untuk mempromosikan atau memperkenalkan lembaga atau perusahaan dari pihak swasta yang terlibat tersebut, hal itu dikarenakan pihak swasta dalam hal ini Bank Indonesia (BI) turut memberikan sumbangsih bagi pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke ini berupa sumbangsih anggaran untuk pembangunan kawasan. Peran pemerintah disini bertujuan untuk menjembatani kepentingan public dan kepentingan swasta agar berjalan wajar tanpa merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta.

b. Sinergitas Pemerintah dengan Masyarakat sebagai motivator

Peran pemerintah sebagai motivator disini memiliki pengaruh pada masyarakat, mereka bisa berpikiran lebih terbuka untuk berpikir ekonomis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membuka warung makan, kedai kopi dan lain sebagainya disekitar kawasan hutan mangrove demi terciptanya simbiosis mutualisme antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat dari segi ekonomisnya tanpa mengesampingkan kelestarian hutan bakau itu sendiri.

Peran pemerintah sebagai motivator masih intens dilakukan sampai saat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam wawancara mendalam,

“Pada setiap kesempatan, kami selaku dinas pariwisata sebagai yang bertanggung jawab atas objek wisata di Kabupaten Sinjai senantiasa mengedukasi atau menginformasikan masyarakat tentang pentingnya menjaga, mengelola, mengembangkan serta mempromosikan kawasan wisata ini demi meningkatkan jumlah wisatawan dan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan desa, serta perekonomian masyarakat dibidang pariwisata khususnya masyarakat tongke-tongke itu sendiri” (Wawancara, 15-07-2020).

Selanjutnya menurut kepala bidang pengembangan industri & pariwisata dalam wawancara mendalam,

“Setiap pengembangan kawasan hutan bakau tongke-tongke ini selalu melibatkan masyarakat sekitar, dan terlebih dahulu memberikan edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan kawasan wisata yang berbasis lingkungan. Itu bisa dilihat dari kesiapan masyarakat dalam menambah kawasan hutan bakau, *tourgate* yang sudah terlatih dan pengetahuan masyarakat sekitar tentang manfaat dari keberadaan hutan bakau itu sendiri” (Wawancara, 15-07-2020).

Berdasarkan jawaban beberapa informan selaku penanggung jawab kawasan wisata tongke-tongke ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah selaku motivator telah terlaksana sebagaimana mestinya hingga

saat ini. Hal itu bisa dilihat dalam setiap pertemuan antara pihak pemerintah dan masyarakat, dimana dinas pariwisata selalu mendorong masyarakat agar meningkatkan kreatifitas dibidang ekonomi kreatif seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pariwisata dalam wawancara berikut.

“hampir setiap tahun dinas pariwisata dan kebudayaan selalu mengadakan pelatihan dan edukasi tentang pengembangan kawasan wisata, terutama masyarakat yang terlibat didalamnya. Dimana masyarakat diberikan pelatihan sebagai pengusaha, sebagai tourgate dan lain sebagainya. Bahkan dalam situasi pandemi covid-19 ini pemerintah selaku yang bertanggung jawab terhadap seluruh kawasan wisata tetap melaksanakan pelatihan di sektor pariwisata tersebut demi meningkatkan SDA yang terampil” ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.”(Wawancara, 20-06-2020).

Hasil observasi lapangan, peran pemerintah selaku motivator dalam mensinergikan semua pihak yang terlibat khususnya pihak masyarakat sudah terealisasi walaupun belum maksimal. Hal itu bisa kita lihat dengan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengembangan kawasan wisata tongke-tongke seperti pengelolaan kawasan pembibitan dan penanaman, kawasan area kuliner dan lain-lain. Itu semua berkat edukasi dan komunikasi yang intens dilakukan pihak pemerintah dengan masyarakat guna kemajuan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke yang lebih baik lagi.

Bentuk motivasi lain pemerintah terhadap masyarakat yaitu kerjasama, dimana pemerintah selalu memotivasi masyarakat agar tetap terlibat dan turut andil dalam pengembangan wisata hutan mangrove ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

“komunikasi juga berperan penting, terutama dalam hal kerjasama yang baik khususnya komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi yang baik

dengan pihak masyarakat menjadi penunjang agar masyarakat paham akan pentingnya kawasan wisata bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah itu sendiri, jadi masyarakat dapat turut andil dalam pengembangan kawasan wisata tongke-tongke" (Wawancara, 20-06-2020).

Berdasarkan hasil observasi lapangan terkait peran pemerintah sebagai motivator dalam hal ini kerjasama antar pihak pemerintah dan pihak masyarakat yaitu Bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat dalam pengembangan objek wisata tongke-tongke yaitu bekerjasama dalam mengelola, menjaga dan mengawasi serta melestarikan kawasan objek wisata tongke-tongke. Dimana pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam mengelola kawasan objek wisata mangrove ini, misalnya dalam hal pengawasan dan perlindungan, dimana pihak pemerintah beserta masyarakat bekerjasama dalam perlindungan dan pengawasan kawasan kawasan wisata tongke-tongke guna meminimalkan kerusakan yang berpotensi terjadi pada kawasan hutan mangrove itu sendiri. Selanjutnya dalam hal pengelolaan, dimana pihak pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam pengelolaan area pembibitan dan penanaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata hutan mangrove tongke-tongke sangat penting mengingat peran dari segi motivator, fasilitator dan dinamisator memiliki fungsi masing-masing dalam tiap pengelolaannya demi mencapai tujuan dari pengembangannya. Yang di deskripsikan sebagai bertikut:

1. Peran pemerintah sebagai dinamisator, kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat dapat dilihat dalam proses pelestarian hutan mangrove seperti kawasan pembibitan dan penanaman yang turut melibatkan langsung antara dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas lingkungan hidup serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove tersebut seperti menanam sampai kegiatan kerja bakti bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan mangrove ini. Sinergitas antara pihak pemerintah dan pihak swasta dilihat keterlibatan pihak BI dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke yaitu memberikan support berupa anggaran biaya pembangunan guna memasimalkan pengembangan wisata hutan mangrove agar sesuai visi, misi dan tujuan dari pengembangannya.
2. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Pengembangan Sumber Daya Manusia kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke sangat berperan penting guna tercapainya sinergi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat nantinya. pihak pemerintah juga menyediakan modal dalam bentuk wadah bagi masyarakat setempat yang ingin berwirausaha. peran pemerintah sebagai

fasilitator sudah terealisasi sebahagian dan bisa dilihat langsung dilapangan seperti area tracking, gazebo, toilet dan lain-lain. Itu membuktkan bahwa peran pemerintah sangat serius dalam mengembangkan kawasan wisata ini sebagai pusat wisata dan penelitian mangrove di Kabupaten Sinjai dengan cara mengalokasikan anggaran pembangunan disektor pariwisata agar dapat berkembang dan sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat meningkatkan PAD dan mensejahterahkan masyarakat sekitar.

3. Bentuk motivasi dari pemerintah terhadap pihak swasta yaitu pemberian izin usaha (promosi) berupa terlibatnya pihak swasta seperti Bank Indonesia (BI) ditandai dengan adanya area/tempat promosi bagi BI dalam kawasan hutan mangrove tongke-tongke agar selain mempromosikan kawasan wisata mangrove. Peran pemerintah disini bertujuan untuk menjembatani kepentingan public dan kepentingan swasta agar berjalan wajar tanpa merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Peran pemerintah selaku motivator telah terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini. setiap pertemuan antara pihak pemerintah dan masyarakat, dimana dinas pariwisata selalu mendorong masyarakat agar meningkatkan kreatifitas dibidang ekonomi kreatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tongke-tongke ditemukan beberapa hambatan. Beberapa hambatan ini yang perlu dibenahi

1. Sosialisasi perda terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali terkait peran pemerintah daerah selaku penanggung jawab penuh dalam pengelolaannya.
2. Komunikasi secara efektif dan merata ke seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove sehingga kerjasama antar seluruh pihak baik pemerintah dengan

masyarakat dapat bersinergi agar tidak munculnya rasa khawatir atau gejolak dikalangan masyarakat terkait kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah.

3. Pengadaan dan pemberahan fasilitas yang belum layak seperti pusat souvenir, pusat informasi dan lain sebagainya.
4. Pembentukan pengelola kawasan wisata dengan tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar lebih memudahkan dalam manajemen pengelolaan serta pengembangan kawasan wisata sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, M., & GUNANTO, E. Y. A. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Boja* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Arfan, A., Umar, R., & Fauzi, K. (2017). *Peranan Pemerintah, Masyarakat dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Tongke Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Sainsmat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*, 6(2), 107-115.
- BPS Kabupaten Sinjai 2019.
- Humokor, A. (2016). Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1163.
- Indonesia, P. N. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- KBBI, 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online) at : <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (Diakses 19 Desember 2019).
- Koetjaraningrat. 2014. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Lexy, J. M. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahifa, T. S., Maulany, R. I., & Barkey, R. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Tongke-Tongke Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 10(2), 268-282.
- Medi, R., Yamin, M., & Sakawati, H. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Religi Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Muljadi, A. J., & Warman, H. A. (2014). *Kepariwisataan dan Perjalanan*, PT. Raja Grafindo Persada.
- No, U. U. (10). tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pitana, I., & Diarta, I. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata*.

Profil Desa Tongke-Tongke 2019.

Sirupang Kanuna, R. (2014). *PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN TORAJA UTARA* (Doctoral dissertation).

Sugiyono .2010. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryadana, M. (2015). *Pengantar pemasaran pariwisata*.

Syarbaini, S. (2016). Faikhuri, *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*.

Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Jakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.







Foto 1

Wawancara dengan Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Foto 2



Foto 4



Foto 6
Tempat Sampah



Foto 8
Wawancara Masyarakat



Foto 10
Keindahan Hutan Mangrove Tongke-Tonge dari udara
Sumber : Google

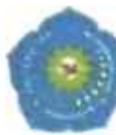


Foto 12
Photobooth dari bantuan Modal Bank Indonesia

Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Nip : 19741021 200903 2 001

Tambahan 19:
1. Ketua LP2M UMM MAKASSAR
2. Pendapat





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 254 Telp. 8469722 Fax. 04111863388 Makassar 90231 E-mail: lp3m@um.ac.id



Nomor : 406/05/C 4-VIII/V/41/2020

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cc. Kepala UPT P2T BKPMI Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

18 Ramadhan 1441 H

11 May 2020 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 612/ESP/A.1-VIII/V/41/2020 tanggal 1 Mei 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ARDIANSYAH

No. Stambuk : 10564 01942 14

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kewasan
Wisata Hutan Mangroved Desa Tongke-Tongke Kabupaten
Sinjai""

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Mei 2020 s/d 16 Juli 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran katziraa.

أَنْسَاتْكُمْ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



RIWAYAT HIDUP



Ardiansyah, S.I.P., Lahir pada tanggal 06 Januari 1996, di Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Penulis Merupakan Anak ke 3 dari 5 bersaudara, dari M. Darwis Patang dan Hj Ramlah. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD NEGERI 03 Sinjai Utara Kabupaten Sinjai pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat di SMP, Penulis melanjutkan SMA Negeri 2 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S.1 jurusan ilmu pemerintahan dengan judul "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai", semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.